

# HAK ASASI MANUSIA

Oleh Nurcholish Madjid

Di negara-negara berkembang, usaha meluaskan penerimaan terhadap ide-ide tentang kemanusiaan universal, seperti yang termuat dalam hak-hak asasi manusia sering terhambat. Salah satu hambatan datang dari pandangan bahwa konsep tentang hak-hak asasi manusia adalah buatan Barat, dengan konotasi sebagai kelanjutan kolonialisme dan imperialisme. Dalam retorika yang menyangkut masalah pandangan hidup, hak-hak asasi manusia yang merupakan konsep Barat itu dianggap sama dengan sekularisme, jika bukan malah sekalian ateisme.

Mendengar tanggapan semacam itu, biasanya kita langsung menolaknya, dan mencapnya sebagai keterbelakangan bahkan konservatif. Karena kita sangat menyadari bahwa ide kemanusiaan itu pada dasarnya universal. Kita mungkin akan segera mengasosiasikan mereka dengan kelompok dengan orientasi primordial tertentu, baik dalam kategori kedaerahan, kebangsaan atau kesukuan, maupun dalam kategori keagamaan. Pengasosiasian itu disertai dengan penilaian bahwa kelompok tertentu memang pada dasarnya tidak dapat menerima ide tentang hak-hak asasi, karena pandangan hidup mereka memang secara inheren tidak mendukung. Begitulah yang dilakukan orang terhadap, misalnya Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, yang ke mana-mana terdengar mengkhotbahkan bahwa demokrasi dan ide tentang hak-hak asasi adalah tidak penting untuk bangsa-bangsa Asia. Yang paling penting baginya adalah pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat.

Lee Kuan Yew terdengar ingin mengetengahkan apa yang disebut sebagai “nilai-nilai Asia” (*Asian values*) sebagai hal yang lebih relevan untuk kemajuan kawasan ini, yakni kawasan Lembah Pasifik Barat. Dan Singapura, juga negara-negara industri baru lainnya yang oleh pers Barat pernah disebut sebagai “naga-naga kecil,” atau “macam-macam Asia” dapat ditampilkan sebagai telah mendemonstrasikan kebenaran tesis Lee dengan kemajuan-kemajuan yang telah mereka capai, hingga masa krisis lalu, walaupun dengan bayaran kurangnya demokrasi di sana. Kemudian Mahathir Muhamad, demikian pula tokoh-tokoh dari RRC, juga sering terdengar mengajukan argumen yang sama. Dan di negeri kita, hal yang serupa juga kita dapati, seperti bahwa perjuangan tentang hak-hak asasi adalah pikiran liberal yang tidak cocok dengan “kepribadian” bangsa, begitulah sering kita dengar scmasa sebelum reformasi.

Jika sekian banyak tokoh yang amat terhormat dan berprestasi tinggi menyuarakan hal-hal yang senada, maka apakah hal itu tidak berarti terdapat adanya unsur-unsur yang benar dalam pernyataan mereka itu? Dapatkah kenyataan itu kita kesampingkan begitu saja sebagai tidak punya substansi, dan hanya merupakan *pretext* atau *smoke screen* untuk suatu kenyataan yang sebenarnya, seperti perlindungan dan pertahanan diri untuk praktik-praktik pemerintahan mereka yang otoriter, tiranik dan merampas atau mengekang pelaksanaan hak-hak warga masyarakat, seperti kita lihat pada banyak bangsa Asia.

Penilaian yang sarat prasangka politik memang cukup umum dibuat orang. Dan jika kita mencoba untuk tidak mendahulukan prasangka, melainkan secara empatik berusaha memahami tokoh-tokoh tersebut, maka barangkali sikap-sikap tersebut merupakan contoh yang paling nyata dari adanya kesenjangan antara ide-ide universal tentang kemanusiaan dengan kenyataan-kenyataan kultural yang bersifat regional atau lokal. Dan pertanyaan yang lebih prinsipil sebenarnya bukanlah apakah memang ada ide universal tentang manusia dan kemanusiaan, tetapi sejauh mana kebenaran klaim universalitas konsep-konsep “modern” tersebut,

yang kenyataannya memang diproduksi di kalangan negara-negara Barat?

Maka terdapat dua pertanyaan gawat: *pertama*, apakah Barat itu memang dengan sendirinya universal, sehingga setiap produk sosial-kulturalnya dengan sendirinya berlaku untuk semua tempat dan waktu? Atau, pertanyaan *kedua*, apakah Barat itu sedemikian uniknya, sehingga apa pun yang terdapat di sana, khususnya segi-segi keunggulan, tidak dapat ditiru atau diterapkan di tempat lain, dan karena itu kita pun tidak bisa belajar darinya? Kaum *chauvinist* Timur akan menjawab “tidak” kepada percanyaan pertama, sambil menegaskan bahwa produk-produk sosial-kultural di Barat bersifat khas lingkungan sosial-kultural yang ada, jadi benar-benar bersifat “Barat” semata, sehingga tidak dengan sendirinya berlaku untuk lingkungan sosial-kultural lain.

Persoalan menjadi rumit karena jika pertanyaan kedua juga dijawab “tidak” maka semua gejala modern dalam banyak segi kehidupan bangsa-bangsa bukan-Barat menjadi tidak berpijakan atau tidak sah, seperti berbagai bentuk pengaturan sosial-politik semisal konstitusi, parlemen, pemilihan umum, sistem pengadilan, dan seterusnya. Dan yang paling mencolok, tentu saja, ialah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang di mana-mana di seluruh dunia telah terjadi pengembangan bersama.

Dan tentu terdengar aneh, bahwa kaum *chauvinist* Barat juga akan menjawab “tidak” kepada pertanyaan pertama dan “ya” kepada pertanyaan kedua. Suatu jawaban yang menegaskan keunikan Barat sehingga, seperti tergambarkan dalam ungkapan Rudyard Kipling yang terkenal, “Barat adalah Barat dan Timur adalah Timur, dan saudara kembar itu tidak akan bertemu.”

Jika kita ingat bahwa kenangan pahit dari kolonialisme dan imperialisme belum terlewatkan lebih dari dua generasi (sekitar 50 tahun), maka prasangka yang keras kepada Barat, yang ikut mengaburkan hal-hal yang sebenarnya tidak murni Barat semata seperti ide tentang hak-hak asasi manusia, dapat sedikit banyak kita pahami. Persoalannya mungkin bukanlah bagaimana

menghilangkan kenangan pahit dan negatif kepada Barat akibat pengalaman kolonialisme dan imperialisme (yang “*legacy*”-nya memang masih belum seluruhnya terhapus). Persoalannya mungkin bagaimana menyadarkan diri yang bersangkutan sendiri tentang hakikat hak-hak asasi itu dengan menggali dan mengembangkan berbagai konsep yang secara potensial ada dalam sistem-sistem budaya yang berbeda-beda. Harapannya ialah, karena *toh* manusia dan kemanusiaan itu pada hakikatnya adalah sama dan satu, maka konsep-konsep kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya itu tentu memiliki titik-titik kesamaan antara satu dengan lainnya.

Jika hal tersebut dapat diterima, maka logikanya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan adalah universal, dan jabaran-jabaran mutakhir atau modern tentang manusia dan kemanusiaan dapat dipandang sebagai tidak lebih daripada kelanjutan logis ide-ide dasar tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang semakin kompleks dan bersifat global.

Maka pada dasarnya jabaran-jabaran hak asasi manusia itu harus diterima sebagai berlaku bagi semua bangsa. Perlunya diadakan penyesuaian jabaran itu kepada tuntutan lingkungan sosial dan kultural setempat adalah untuk membuatnya lebih fungsional secara efektif, tidak untuk “menawar habis” nilai-nilai inti dalam konsep tentang hak asasi itu sendiri. [❖]